

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan sektor publik saat ini adalah semakin menguatnya tuntutan pelaksanaan akuntabilitas publik oleh organisasi sektor publik, seperti : pemerintah pusat dan daerah, unit-unit kerja pemerintah, serta departemen dan lembaga-lembaga negara. Tuntutan akuntabilitas sektor publik terkait dengan perlunya dilakukan transparansi dan pemberian informasi kepada publik dalam rangka pemenuhan hak-hak publik. Terwujudnya akuntabilitas publik merupakan tujuan utama dari reformasi publik (Mardiasmo, 2018:26).

Keterkaitan akuntabilitas dengan *good governance* sangat erat karena akuntabilitas persyaratan kunci dalam *good governance*. Akuntabilitas merupakan persyaratan dasar untuk mencegah penyalahgunaan wewenang yang didelegasikan dan menjamin diarahkannya pencapaian tujuan-tujuan nasional yang diberikan secara luas dengan tingkat efisiensi, efektivitas, kejujuran dan hasil semaksimal mungkin. Dalam pemerintahan, akuntabilitas sektor publik merupakan suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan visi, misi dan strategi maupun personalisasi atau pelaksanaan pembangunan. Dengan adanya akuntabilitas publik, pemerintah harus menyajikan informasi yang benar dan relevan untuk menilai kinerja, pelayanan dan lain sebagainya.

Akuntansi saat ini bukan hanya instrumen untuk mencatat suatu kejadian ekonomi, tetapi merupakan tujuan dalam setiap prosesnya. Di setiap sektor, baik sektor publik maupun sektor swasta, akuntansi mempunyai kontribusi dalam hal pengelolaan sumber daya yang ada dalam sektor tersebut. Kontribusi akuntansi perusahaan meliputi menciptakan kontrol internal, menguji akuntabilitas, dan memberikan informasi yang handal dan transparan. Sehingga setiap perusahaan akan membutuhkan proses akuntansi agar tujuan dari perusahaan tersebut dapat diperhitungkan dan dicapai dengan baik.

Good governance pada dasarnya adalah sebuah konsep sebagai suatu metode atau pola yang dapat terwujud jika terdapat tiga pilar pendukung yang berfungsi dengan baik, yaitu negara, sektor swasta, dan masyarakat madani dalam suatu negara. Konsep *good governance* adalah sebuah tata penyelenggaraan kekuasaan negara yang di dalamnya terdapat banyak prinsip yang mendukung agar penyelenggaraan dilakukan dengan baik. *Good governance* mempunyai banyak prinsip yang terkandung, menurut *United National Development Program* (UNDP) terdiri dari *participation, rule of law, transparency, responsiveness, consensus orientation, equity, efficiency and effectiveness, accountability, and strategic vision* (Mardiasmo, 2018:23).

Dalam organisasi sektor publik peranan akuntansi dalam mewujudkan *good governance* sangat penting, yaitu untuk mendukung terciptanya transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, serta efisiensi dan efektivitas. Peran akuntansi dalam mewujudkan *good governance* difokuskan untuk menciptakan sistem birokrasi yang handal dan transparan, khususnya pada pembuatan laporan

keuangan yang di dalamnya terdapat banyak informasi penting untuk pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, dan sebagai tolak ukur kinerja. Akuntansi berperan penting dalam penyusunan laporan keuangan organisasi sektor publik yang sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku, standar yang digunakan yaitu Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).

Menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), menyatakan bahwa SAP adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Laporan keuangan pemerintah disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh pemerintah selama satu periode pelaporan (Gani, 2018:18). Laporan keuangan tersebut adalah landasan utama dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan dari organisasi sektor publik, jika laporan keuangan yang disusun oleh organisasi sektor publik tersebut dapat diandalkan dan transparan maka dapat membantu pemangku kepentingan dalam menyuarakan pendapat untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan bagi organisasi sektor publik tersebut. Dengan demikian perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan yang dibuat akan lebih efektif dan efisien (Ashari, 2019:2).

Tuntutan untuk mewujudkan *good governance* sudah menjadi salah satu isu penting di Indonesia sejak beberapa tahun lalu. Hal tersebut dikarenakan oleh krisis finansial yang terjadi pada tahun 1997-1998 yang meluas menjadi krisis multidimensi. Krisis tersebut telah mendorong tuntutan perbaikan tata kelola dan peran akuntansi dalam penyelenggaraan negara termasuk birokrasi pemerintahan.

Salah satu penyebab terjadinya krisis multidimensi karena buruknya pengelolaan dalam penyelenggaraan tata pemerintahan yang diindikasikan oleh beberapa masalah, antara lain dominasi kekuasaan oleh satu pihak terhadap pihak-pihak lainnya sehingga pengawasan menjadi sulit dilakukan, terjadinya tindakan KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), rendahnya kinerja aparatur termasuk dalam pelayanan kepada masyarakat diberbagai bidang (Nurdiono, 2016:19).

Salah satu organisasi sektor publik yang mengutamakan pelayanan pada masyarakat adalah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ogan Komering Ulu. Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ogan Komering Ulu dituntut untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku, agar informasi tentang laporan keuangan dapat diandalkan dan transparan bagi perusahaan dengan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*.

Langkah yang dapat di ambil untuk mencapai *good governance* adalah penerapan sistem akuntansi pemerintah yang adil, transparan, dan bertanggung jawab. Akuntansi sektor publik memainkan peran penting dalam menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk akuntabilitas publik. Tata kelola yang baik dan akuntansi di sektor publik sangat terkait. Pemerintah daerah harus menyadari bahwa pelayanan kepada masyarakat itu penting dan masyarakat berhak mengetahuinya (Mardiasmo, 2018).

Sistem pelaporan keuangan di Dinas Tenaga Kerja OKU sudah sesuai dengan SAP. Tapi terkadang ada kendala menyangkut laporan keuangan yang belum sesuai target dan sasaran, sehingga Dinas Tenaga Kerja OKU dan pemangku kepentingan belum dapat melakukan perumusan kebijakan dan

pengambilan keputusan secara maksimal. Hal itu dikarenakan pandemi covid 19 yang berdampak pada target dan sasaran di Dinas Tenaga Kerja OKU. Minimnya anggaran yang dikelola dan kurangnya sarana serta prasarana untuk melakukan pelatihan dan kegiatan lainnya, sehingga efektivitas dalam memberikan pelayanan kepada publik kurang maksimal. Akibat dari belum tercapainya target dan sasaran akan berdampak pada akuntabilitas publik. Laporan keuangan yang dihasilkan akan menjadi bentuk akuntabilitas publik. Karena fungsi akuntabilitas adalah perwujudan dari kewajiban organisasi sektor publik untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban berupa laporan akuntabilitas yang disusun secara periodik.

Berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik ingin melakukan penelitian tentang **“Analisis Peran Akuntansi Dalam Mewujudkan *Good Governance* Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ogan Komering Ulu.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan pada bagian terdahulu, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah menganalisis bagaimana peranan akuntansi dalam mewujudkan *good governance* pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ogan Komering Ulu?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran akuntansi dalam mewujudkan *good governance* pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ogan Komering Ulu.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang peranan akuntansi dalam mewujudkan *good governance*, dan dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian dimasa yang akan datang.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai Peran Akuntansi Dalam Mewujudkan *Good Governance*.

2. Bagi Universitas

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi untuk penelitian selanjutnya.

3. Bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Ogan Komering Ulu

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan bisa menjadi masukan bagi Dinas Tenaga Kerja dan instansi pemerintah daerah lainnya yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bertanggungjawab dan transparan.